



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WASKITO DIHANTONO, S.IPEM. MM
2. Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
3. NHK : 400198

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.840.000.000

1. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/90 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
5. Tanah Seluas 433 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
6. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 231.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 212.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.400.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.138.900.000
III. HUTANG	Rp.	95.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.043.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.